

**LAPORAN PENELITIAN**



**JUDUL PENELITIAN**

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN  
PADA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KLATEN**

Tim Peneliti :

Arie Rachma Putri, S.E., M.Si./ NIDN 0620057705

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KLATEN**

**2022**

**HALAMAN PENGESAHAN**

1. Judul Pengabdian : Analisis Kinerja Keuangan Pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten
2. Bidang Ilmu : Ekonomi
3. Identitas pelaksana
  - a. Nama : Arie Rachma Putri, SE., M.Si.
  - b. NIDN : 0620057703
  - c. Jabatan : -
  - d. Prodi : D3 Akuntansi
  - e. Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Klaten
  - f. Alamat Kantor : Jl. Ir. Soekarno Km. 1 Buntal Klaten Tengah, Klaten, Jawa Tengah
4. Biaya yang diusulkan : Rp. 2.500.000,.
5. Sumber Biaya : Hibah Internal

Klaten, 20 Juli 2022

Mengetahui,  
Ka. LPPM

Pelaksana



Sri Handayani, SKM., M.Kes.



Arie Rachma Putri, SE., M.Si.

Menyetujui,  
Rektor



Sri Sat Titi Hamranani, S.Kep. Ns. M.Kep

## RINGKASAN

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten yang merupakan suatu instansi pemerintah daerah yang melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang statistik berupa sensus dan survei untuk menghasilkan data yang dibutuhkan baik oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat pada umumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah laporan keuangan pemerintah pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 dan untuk mengetahui kinerja keuangan belanja pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten periode 2014-2018.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yaitu penelitian yang berusaha untuk menentukan pemecahan masalah yang ada dengan menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data, serta penampilan dari hasilnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten tahun 2014-2018.

Dari analisis data yang dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) laporan keuangan pemerintah pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 (2) Efisiensi belanja menunjukkan rata-rata di bawah 100%.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
RINGKASAN .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Kegiatan.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....	23
A. Jenis Penelitian.....	23
B. Waktu dan Tempat Penelitian.....	23
C. Metode Pengumpulan Data .....	23
D. Analisis Data .....	24
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	28
A. <b>Gambaran Umum Badan Pusat Statistik</b> .....	28
B. Penyajian Data .....	29
C. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah .....	65
BAB V PENUTUP .....	74
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	75
DAFTAR PUSTAKA	



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Berkembangnya reformasi di Indonesia saat ini telah membuka suatu wawasan baru mengenai kewenangan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dengan terpisahnya sistem pengelolaan keuangan dan banyaknya pemekaran wilayah baru membuat sistematis pemerintahan juga mengalami perubahan, khususnya pada pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menjadi perhatian utama bagi pembuat laporan keuangan daerah.

Laporan keuangan merupakan laporan yang menunjukkan kondisi finansial suatu entitas pada suatu periode tertentu. Laporan keuangan pemerintah daerah sendiri adalah gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut. Selain itu, laporan keuangan juga merupakan sumber informasi baik bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan dan keputusan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan ini terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan disusun dan disajikan sekurang-kurangnya setahun sekali.

Laporan keuangan menurut pemerintah terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Penyusunan Neraca Pemerintah Daerah
3. Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah
4. Catatan atas Laporan Keuangan

Oleh karena itu laporan keuangan mengambil keputusan tentang pencapaian kinerja program dan kegiatan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja dan realisasi penyerapan pembiayaan. Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang berlaku di negara kita saat ini, masalah

pengelolaan keuangan daerah telah menjadi perhatian umum bagi para pengambil keputusan dalam pemerintah baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah. Di era reformasi ini, pemerintah telah melakukan perubahan penting dan mendasar untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang ada serta upaya mengakomodasi berbagai aspirasi yang berkembang di daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Laporan keuangan menjadi salah satu bahan penilaian yang penting, karena entitas ini bekerja berdasarkan sebuah anggaran dan realisasi anggaran tersebut tercantum dalam laporan keuangan, terutama untuk pemerintah daerah. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Kelompok pengguna laporan keuangan ini terdiri atas beberapa kelompok utama yaitu masyarakat, para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman pemerintah. Dengan demikian, laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna melainkan publik atau semua kalangan, karena uang negara yang dikelola dan digunakan pemerintah daerah itu sebagian besar merupakan berasal dari pajak yang dipungut dari rakyat. Oleh karena itu ada sebuah badan yang harus meniali laporan keuangan tersebut dan menginformasikan laporan keuangan tersebut kepada publik, dalam hal ini BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) yang bertindak sebagai penilai laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah daerah.

Dalam pengelolaan keuangan, pemerintah melakukan reformasi dengan mengeluarkan UU No. 17 Tahun 2003 pasal 32 ayat 1 dan 2 tentang keuangan negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dimana APBN dan APBD harus disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), SAP disusun oleh komite standar yang independen dan ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah (PP) setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Badan Pusat Statistik adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. sebelumnya, Badan pusat Statistik

merupakan biro Statistik, yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan UU Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Sebagai pengganti kedua UU tersebut ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Berdasarkan UU ini yang ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan dibawahnya, secara normal Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pusat Statistik yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Penyusunan laporan keuangan Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten mengacu pada peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintah.

Berbagai pihak mengandalkan informasi keuangan yang disajikan dan dipublikasikan oleh pemerintah daerah dengan kegunaan yang berbeda-beda. Sehingga laporan yang disajikan tersebut harus berkualitas. Laporan keuangan dikatakan berkualitas jika laporan keuangan yang disajikan tersebut memenuhi syarat yaitu diakuntansikan dengan benar, dilaporkan secara lengkap, dan diaudit secara independen.

Untuk dapat memenuhi karakteristik tersebut, maka pengelolaan data keuangan di pemerintah daerah tidak terlepas dari peran pegawai yang mengelola dan melakukan pelaporan keuangan. Sebagai wujud dalam upaya pencapaian organisasi, sumber daya manusia merupakan elemen dari organisasi yang memiliki peran sangat penting. sehingga harus dapat dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia tersebut dapat dijalankan sebaik mungkin guna membantu upaya pencapaian yang dimaksud oleh organisasi bersangkutan. pengelolaan keuangan daerah yang baik, harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, didukung dengan latar pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan dan memiliki pengalaman kerja dibidang keuangan. Untuk menerapkan system akuntansi, sumber daya manusia yang berkualitas tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. kegagalan sumber daya manusia akan berdampak kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang diterapkan pemerintah.



Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten dalam mempertanggungjawabkan keuangan menyajikan laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasi, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. permasalahan yang lain adalah terjadinya defisit LO pada periode yang berakhir pada 31 desember 2018 dan 31 desember 2017 sebesar Rp7.354.086.331 dan Rp6.973.868.802. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KLATEN”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Normor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah?
- 2) Apakah anggaran Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten sudah digunakan secara efisien?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **a. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan masalah yang dikemukakan, tujuan yang diharapkan tercapai adalah:

1. Untuk mengetahui apakah laporan keuangan pemerintah pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Normor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
2. Untuk mengetahui apakah anggaran pemerintah daerah pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten berjalan dengan baik.
3. Untuk menganalisa kinerja keuangan pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten selama tiga tahun.

### **b. Manfaat Penelitian**

- 1) Untuk menambah wawasan penulis dibidang Akuntansi secara umum dan dibidang Akuntansi Keuangan Daerah secara khusus, dimana penulis

dapat melihat secara langsung praktek akuntansi laporan keuangan yang diterapkan pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten.

- 2) Bagi Badan Pusat Statistik Kabupaten klaten, dari hasil ini dapat memberi masukan yang dapat digunakan dalam menyempurnakan pelaporan keuangan pemerintah.
- 3) Bagi akademis, penelitian ini dapat diharapkan menjadi bahan referensi untuk penelitian lanjutan dengan judul yang sama.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Akuntansi dan Laporan Keuangan Daerah**

Akuntansi berperan penting dalam suatu lembaga, perusahaan, maupun organisasi untuk mengolah keuangan. Pengertian dari akuntansi itu sendiri merupakan sistem pelaporan, perhitungan, pengelompokan, informasi dan ringkasan-ringkasan yang bersifat kuantitatif mengenai keuangan dengan seluruh transaksi yang sudah dilaksanakan oleh suatu lembaga atau perusahaan.

Revrisond mengatakan bahwa pengertian akuntansi dapat dijelaskan melalui dua pendekatan, yaitu dari segi prosesnya dan dari segi fungsinya. Dilihat dari segi prosesnya, akuntansi adalah suatu keterampilan dalam mencatat, menggolong-golongkan, dan meringkas transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan oleh suatu lembaga atau perusahaan, serta melaporkan hasil-hasilnya di dalam suatu laporan yang disebut sebagai laporan keuangan. Adapun dilihat dari segi fungsinya, akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang berfungsi menyajikan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, dari suatu lembaga atau perusahaan, yang diharapkan dapat digunakan sebagai dasar mengambil keputusan ekonomi diantara berbagai alternatif tindakan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. selanjutnya dalam pasal 4 dikatakan pula bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asa keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 pengertian laporan keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelapor. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terjadi dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan

pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari:

- a. Pemerintah pusat
- b. Pemerintah daerah
- c. Masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat
- d. Suatu organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyampaikan laporan keuangan

## **B. Komponen Laporan Keuangan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, komponen laporan keuangan sebagai berikut:

komen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
- c. Neraca
- d. Laporan Operasional (LO)
- e. Laporan Arus Kas (LAK)
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

### **1). Laporan Realisasi Anggaran**

laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Pendapatan LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak dibayar kembali oleh pemerintah.

- b) Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam satu periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- c) Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d) Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dana/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

#### 2). Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

#### 3). Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari asset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan

uang termasuk sumber dana nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara Karena alasan sejarah dan budaya. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi nonpermanen dan permanen. Investasi nonpermanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal pemerintah dan investasi permanen lainnya. Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan. Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

- b) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya

mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi dimasa yang akan datang. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

- c) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

#### 4). Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.

Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Pendapatan LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- b) Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- c) Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d) Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi

biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

#### 5). Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara/Daerah.
- b) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/Daerah.

#### 6). Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Menurut Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 contoh format Laporan

#### 7). Catatan Atas laporan Keuangan

Catatan atas Laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintah serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan/menyajikan/menyediakan hal-hal sebagai berikut:

- a) Mengungkapkan informasi umum tentang Entitas pelaporan dan Entitas Akuntansi;



- b) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c) Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d) Menyajikan informasi tentang dasar penyusutan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e) Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- g) Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;

### **C. Fungsi Pelaporan Keuangan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, fungsi laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1. Akuntabilitas;
2. Manajemen;
3. Transparansi;
4. Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*); dan
5. Evaluasi Kinerja.

Fungsi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

5. Evaluasi kerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber dana ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.”

#### **D. Tujuan dari penyajian Laporan Keuangan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama satu periode pelaporan.

Untuk memenuhi kajian-kajian tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.”

#### **E. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat dapat memenuhi tujuannya. Dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah, karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah meliputi:

- a) Relevan;
- b) Andal;
- c) Dapat dibandingkan; dan
- d) Dapat di pahami.

#### a) Relevan

Laporan keuangan ini bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

informasi yang relevan memiliki karakteristik:

1) Memberikan manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu. Laporan keuangan berkualitas jika dapat memberikan manfaat untuk evaluasi kinerja masa lalu dan memberikan umpan balik dalam rangka perencanaan keuangan dan perbaikan kinerja di masa datang.

2) Memberikan manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini. Laporan keuangan berkualitas jika dapat memberikan manfaat untuk memprediksi kondisi keuangan, kebutuhan keuangan, dan kinerja di masa datang.

3) Disajikan tepat waktu (*timeliness*)

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

4) Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada.

Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi dapat dicegah.

#### b) Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat dan

penyajianya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

1) Penyajian jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Laporan keuangan yang berkualitas terbebas dari salah saji material dan tidak ada manipulasi laporan keuangan.

2) Dapat diverifikasi

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh. Laporan keuangan berkualitas jika dapat diverifikasi kebenarannya melalui proses audit independen.

3) Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. Penyajian laporan keuangan tidak bersifat tendensius dan bias terhadap kepentingan kelompok tertentu.

c) Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang dapat diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

d) Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, penggunaan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas

pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.”

## **F. Kompetensi Sumber Daya Manusia**

### **1. Kompetensi**

Menurut S.K kepala badan kepegawaian negara no. 43 tahun 2001 tentang standar kompetensi jabatan struktual PNS adalah kemampuan dan karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang pegawai negeri sipil berupa pengetahuan, keahlian, dan sikap perilaku dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Kompetensi tersebut dibagi menjadi dua yaitu:

#### **a. Kompetensi Umum**

Kompetensi umum adalah kemampuan dan karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatan struktual yang dipangkunya.

#### **b. Kompetensi Khusus**

Kompetensi khusus adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa keahlian untuk melaksanakan tugas jabatan struktual yang dipangkunya.

Menurut McClelland dalam CHR. Jimmy L. Gaol (2014) mengungkapkan Kompetensi sendiri pada umumnya diartikan sebagai kecakapan, keterampilan, dan kemampuan. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai komponen utama pembentuk kompetensi, yaitu:

- 1) Keterampilan: keahlian/kecakapan melakukan sesuatu dengan baik.
- 2) Pengetahuan: informasi yang dimiliki/dikuasai seseorang dalam bidang tertentu.
- 3) Peran sosial: citra yang diproyeksikan seseorang kepada orang lain (the outer self).
- 4) Citra diri: persepsi individu tentang dirinya (the inner self).
- 5) Trait: karakteristik yang relatif konstan pada tingkah laku seseorang.
- 6) Motif: pemikiran atau niat dasar yang konstan yang mendorong individu untuk bertindak atau berperilaku.

Adapun yang dimaksud dengan standar kompetensi adalah spesifikasi atau sesuatu yang dilakukan, menurut persyaratan minimal yang harus dimiliki oleh seorang yang akan melakukan pekerjaan tertentu agar yang

bersangkutan mempunyai kemampuan melaksanakan pekerjaan dengan hasil yang baik (Nyoman Rudana, 2006).

## **2. Sumber Daya Manusia**

Manusia adalah sumber dan objek persoalan yang besar, dan memang pantas untuk dipersoalkan hakikat manusia, yaitu manusia dalam eksistensi dan aktivitasnya, dicirikan oleh sejumlah tingkat. Pertama, manusia meruoakan makhluk jasmani yang tersusun dari bahan materil organic. Selanjutnya kita mengenal manusia sebagai sosok organisme hidup yang menyatukan aktivitas kehidupan jasmani ke dalam dirinya sendiri. Sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya fikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Perilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya.

Menurut Nawawi (2001) mendefinisikan bahwa:

“Sumber daya manusia adalah orang yang bekerja dan berfungsi sebagai aset organisasi/perusahaan yang dapat dihitung jumlahnya (kuantitatif). Selanjutnya dikatakan Nawawi, SDM adalah potensi yang menjadi motor penggerak organisasi.”

Sumber daya yang kompeten, yang didukung dengan latar belakan yang mendukung, berpendidikan akuntansi, sering mengikuti pelatihan, serta memiliki pengalaman di bidang keuangan dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik. Hal tersebut diperlukan untuk menerapkan sistem akuntansi yang ada. Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik.

Berdasarkan uraian sumber daya yang kompeten, yaitu:

### **a. Pendidikan Formal**

Menurut Abdul Djalil Indris Saputra (2002) mengemukakan bahwa:

“pendidikan adalah katalisator dalam upaya pengembangan sumber daya manusia. Pendidikan adalah komponen mendasar dari upaya pengembangan sumber daya manusia. Sumber daya manusia berkualitas yang memiliki keunggulan kompetitif, semua itu hanya dapat diperoleh melalui pendidikan.”

Sering kali pendidikan menjadi indikator bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula pengetahuan seseorang.

Tingkat pendidikan yang memadai seseorang lebih mudah melaksanakan tugasnya karena pengelolaan keuangan daerah membutuhkan sumber daya manusia yang kompetendengan dilatar belakangi pendidikan akuntansi atau keuangan agar lebih mudah memahami pekerjaan yang dilakukan.

b. Pendidikan dan pelatihan

CHR. Jimmy L Gaol (2014) mengemukakan pendidikan membentuk dan menambah pengetahuan seseorang untuk mengerjakan sesuatu dengan lebih cepat dan tepat, sedangkan latihan membentuk dan meningkatkan keterampilan kerja. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan latihan seseorang, semakin tinggi pula tingkat produktivitasnya.

Rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia dewasa ini merupakan suatu indikasi rendahnya prodiktivitas angkatan kerja di Indonesia. Dengan demikian, peningkatan kualitas pendidikan dan program-program latihan kerja merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak. Seseorang yang mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi memungkinkan dia untuk bekerja lebih produktif dari pada orang lain yang tingkat pendidikannya rendah. Hal ini dikarenakan orang yang tingkat pendidikannya tinggi memiliki cakrawala atau pandangan yang lebih luas sehingga mampu untuk bekerja atau mendapatkan lapangan kerja. Beberapa tujuan dari pendidikan dan pelatihan pegawai, diantaranya:

- 1) meningkatkan produktivitas kerja.
- 2) Meningkatkan kecakapan menajerial pegawai.
- 3) Meningkatkan efesiensi tenaga dan waktu.
- 4) Mengurangi tingkat kesalahan pegawai.
- 5) Meningkatkan pelayanan yang lebih baik dari karyawan untuk konsumen perusahaan dan/atau organisasi.
- 6) Menjaga moral pegawai yang baik.
- 7) Meningkatkan karier pegawai.

c. pengalaman kerja

Pengalaman dapat diperoleh seseorang melalui secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung bisa didapat ketika ia bekerja pada suatu organisasi lalu ia meninggalkan organisasi tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan tidak langsung di dapat dengan pengamatan terhadap peristiwa akuntansi suatu organisasi.



Penyusunan laporan keuangan, diharapkan memiliki sumber daya manusia yang telah memiliki pengalaman kerja yang lebih lama dibidang akuntansi atau keuangan, karena dalam menyusun laporan keuangan dibutuhkan pegawai yang benar-benar memahami akuntansi atau keuangan beserta aturan-aturan dalam penyusunan laporan keuangan daerah. Pengalaman kerja di dalam suatu organisasi pun menjadi salah satu indikator bahwa seseorang telah memiliki kemampuan yang lebih. Semakin lama seorang pegawai bekerja dalam suatu bidang di organisasi, maka semakin banyak pengalaman pegawai tersebut dan semakin memahami apa yang menjadi tugas serta tanggungjawab yang diberikan kepada pegawai tersebut (Hilda Berliana, 2015).

#### **G. Persamaan Dan Perbedaan Akuntansi Pemerintah Dan Akuntansi Perusahaan**

1. Persamaan akuntansi pemerintah dengan akuntansi perusahaan
  - a. Mempunyai tujuan yang sama, yaitu penyediaan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dan tepat waktu.
  - b. Menggunakan konsep akuntansi, konvensi, praktik, dan prosedur yang dapat dipakai oleh akuntansi perusahaan.
  - c. Menggunakan siklus akuntansi yang sama.
  - d. Memakai istilah yang sama, seperti buku harian, buku besar, laporan keuangan, dan lain-lainnya.
  - e. Menggunakan konsep akuntansi yang diakui secara luas, seperti konsistensi, objektif, biaya, material, tutup buku, yang digunakan pada pelaksanaan akuntansi pemerintah seperti yang berlaku pada akuntansi perusahaan.
  - f. Proses akuntansi dimulai dengan pengakuan dan analisis dokumen transaksi yang utama, selanjutnya, diikuti oleh pencatatan ke dalam buku harian dan pencatatan ke dalam buku besar buku tambahannya. Dari pencatatan yang sudah dilakukan tersebut diringkas untuk menyusun laporan keuangan.
2. Perbedaan akuntansi pemerintah dan akuntansi perusahaan
  - a. Kegiatan-kegiatan pemerintah pada umumnya tidak ditujukan untuk mencari laba sebagaimana halnya pada kegiatan-kegiatan perusahaan.

- b. Pemberi pelayanan untuk kepentingan keamanan, kesejahteraan, dan manfaat-manfaat umum lainnya kepada seluruh masyarakat, sedangkan perusahaan menjual barang-barang dan jasa-jas yang dihasilkan.
- c. Pemberi dana pemerintah, seperti wajib pajak bertindak secara sukarela dan mereka mengharapkan agar dana yang mereka bayarkan tidak ditangani dengan efektif, efisien, dan ekonomis untuk memberikan pelayanan yang bermanfaat kepada seluruh rakyat, sedangkan para pemberi modal perusahaan bermaksud memperoleh keuntungan langsung.
- d. Hubungan rakyat sebagai penyedia dana dan rakyat sebagai konsumen barang-barang dan jasa-jasa dari pelayanan tersebut tidak langsung dan tidak terdapat pasar terbuka untuk menguji manfaat dari barang dan jasa yang dihasilkan, sedangkan hubungan antara penjual dan pembeli dalam dunia usaha dilaksanakan pada pasar atau bursa terbuka.
- e. Anggaran tahunan negara yang disiapkan oleh pemerintah merupakan rencana operasi keuangan yang harus mendapat persetujuan dari lembaga legislatif. Jumlah anggaran belanja yang tercatat dalam anggaran negara tersebut merupakan batas maksimal yang wajib ditaati oleh pemerintah. Pengguna yang melampaui batas anggaran belanja yang sudah disetujui oleh lembaga legislatif tersebut tentu harus mendapat persetujuan dari lembaga legislatif itu. Adapun anggaran tahunan perusahaan dilaksanakan oleh direksi yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan rapat umum pemegang saham.

#### **H. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan pelaksanaan anggaran.

Penyusunan SAP Berbasis Akrual dilakukan oleh KSAP melalui proses baku penyusunan (*due process*). Proses baku penyusunan SAP tersebut merupakan pertanggungjawaban professional KSAP.

Penyusunan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat menjadi PSAP dilandasi oleh Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, yang merupakan konsep dasar penyusunan dan pengembangan SAP, dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintah, penyusunan laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah.

#### **I. PSAP No. 01 Penyajian Laporan Keuangan**

Tujuan pernyataan standar ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antara periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, standar ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis akrual. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam standar akuntansi pemerintahan lainnya.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah untuk sebab itu harus dapat memenuhi kebutuhan ilmiah. Salah satu cara untuk dapat memenuhi kebutuhan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan dengan metode penelitian. Jenis penelitian ini merupakan studi kasus dan wacana memperoleh data yang diambil dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten. Setelah mengetahui jenis penelitian yang dilakukan, maka perlu mengetahui metodeologi penelitian yang dilakukan. Desain penelitian yang dilakukan meliputi Populasi Penelitian Dan Sampel Penelitian, Variabel Penelitian, Pengumpulan Data, Teknik Pengelolaan, dan Analisa Data.

#### **B. Waktu Dan Tempat Penelitian**

Dalam penelitian, lokasi penelitian sangat penting untuk mengetahui letak yang sebenarnya. Lokasi yang diteliti untuk mendapat hasil yang dapat dimanfaatkan, dalam hal ini adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten Jl Merapi No. 6 Klaten. Adapun waktu pelaksanaan penelitian pada bulan Februari – Agustus 2022

#### **C. Metode Pengumpulan Data**

##### 1. Data yang diperoleh

###### a. Data Primer

Adalah data informasi yang dikumpulkan, diolah dan diperoleh langsung dari pejabat yang mengurus masalah laporan keuangan di badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten. Berupa dokumen laporan keuangan tahunan.

###### b. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari dokumen-dokumen atau catatan-catatan, buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian, mencari referensi dari internet dan peundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

##### 2. Cara memperoleh data menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

###### a. Wawancara/Interview

Adalah metode mengumpulkan data untuk memperoleh informasi secara langsung dari sumbernya dengan mengajukan pertanyaan kepada pejabat bagian keuangan pada badan pusat statistik.

b. Metode Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung kepada objek yang diteliti. Dalam mengamati objek penelitian, peneliti menggunakan dua macam teknik penelitian, yaitu:

1. Visual (melihat langsung ke objek penelitian)

Tentang laporan keuangan tahunan yang dibuat oleh badan pusat statistik kabupaten klaten.

2. Technical (teknik pelaksanaannya)

Tentang mekanisme perhitungan, pembukuan, dan pelaporan.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang penyelidikannya ditujukan pada penguraian dan penjelasan apa yang telah lalu, melalui sumber-sumber dokumen. Dokumen tersebut berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan dari tahun 2014-2018.

#### **D. Analisis Data**

Metode analisis data adalah untuk membahas dan menjabarkan data yang diperoleh, kemudian masalah yang ada disimpulkan agar didapatkan jawaban yang tepat. Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1) Analisis varians

Analisis varians merupakan perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dan anggaran. Selisih anggaran belanja dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu 1) selisih disukai (*favourable variance*) dan 2) selisih tidak disukai (*unfavourable variance*). Dalam hal realisasi belanja lebih kecil dari anggarannya disebut *favourable variance*, sedangkan jika realisasi belanja lebih besar dari anggarannya maka dikategorikan *unfavourable variance*.

Analisis varians ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Varians = Realisasi Belanja – Anggaran Belanja

2) Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja

Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja. Pada umumnya proporsi belanja operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60-90%. Rasio belanja operasi terhadap total belanja dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 3.1

Tabel Kriteria Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja

<b>Kriteria Efisiensi</b>	<b>Presentase Belanja Operasi</b>
< 60%	Kurang Baik
60%-90%	Baik

*Sumber : Mahmudi (2019)*

3) Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja

Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja. Berbeda dengan belanja operasi yang bersifat pendek dan rutin, pengeluaran belanja yang dilakukan saat ini akan memberikan manfaat jangka menengah dan panjang. Pada umumnya proporsi belanja modal terhadap total belanja adalah antara 5-20%. Rasio belanja modal ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja modal}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 3.2

Tabel Kriteria Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja

<b>Kriteria Efisiensi</b>	<b>Presentase Belanja Modal</b>
< 5%	Kurang Baik
5-20%	Baik

*Sumber : Mahmudi (2019)*

#### 4) Rasio Efisiensi Belanja

Rasio Efisiensi Belanja menggambarkan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak bersifat absolut, tetapi relatif. Artinya tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini. Kita hanya dapat mengatakan bahwa belanja daerah relative lebih efisien dibandingkan dengan tahun lalu, unit kerja A lebih efisien disbanding dengan unit kerja B. pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%, sebaliknya jika lebih maka mengindikasikan telah terjadi pemborosan anggaran.

Rasio efiseinsi belanja dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 3.3

**Tabel Kriteria Efisiensi Belanja**

<b>Kriteria Efisiensi</b>	<b>Presentase Efisiensi</b>
100% Keatas	Tidak Efisien
100%	Efisien Berimbang
Kurang Dari 100%	Efisien

*Sumber : Mahsun (2018)*



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Badan Pusat Statistik**

##### **1. Sejarah Singkat Badan Pusat Statistik**

Kegiatan statistik di Indonesia sudah dilaksanakan sejak masa Pemerintah Hindia Belanda oleh Direktur Pertanian, Kerajinan, dan Perdagangan (*Directeur Van Landbouw Nijverheld en Handel*) di Bogor. Pada Februari 1920. Lembaga tersebut bertugas mengolah dan mempublikasikan data statistik. Pada tanggal 24 september 1924, kegiatan statistik pindah ke Jakarta dengan nama *central kantoor voor de statistiek* (CKS) dan melaksanakan Sensus Penduduk pertama di Indonesia pada tahun 1930. Pada masa pemerintah jepang di Indonesia pada tahun 1942-1945, CKS berubah nama menjadi *Shomubu Chosasitsu Gunseikanbu* dengan kegiatan memenuhi kebutuhan perang/militer.

Setelah kemerdekaan Republik Indonesia (RI) diproklamasikan pada tanggal 17 agustus 1945, lembaga tersebut dinasionalisasikan dengan nama Kantor Penyelidikan Perangkaan Umum Republik Indonesia (KAPPURI) dan dipimpin oleh Mr. Abdul Karim Pringgodigdo. Setelah adanya Surat Edaran Kementerian Kemakmuran tanggal 12 juni 1950 Nomor 219/S.C., lembaga KAPPURI dan CKS dilebur menjadi Kantor Pusat Statistik (KPS) dibawah tanggung jawab Menteri Kemakmuran.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perekonomian Nomor P/44, KPS bertanggungjawab kepada Menteri Perekonomian. Selanjutnya, melalui Sk Menteri Perekonomian tanggal 24 Desember 1953 Nomor IB.009/M kegiatan KPS dibagi dalam dua bagian yaitu Afdeling (Bagian Riset) dan Afdeling B (Bagian Penyelenggaraan Dan Tata Usaha). Berdasarkan keppres X nomor 172 tanggal 1 Juni 1957, KPS berubah menjadi Biro Pusat Statistik dan bertanggungjawab langsung kepada Perdana Menteri.

Sesuai dengan UU No.6/1960 tentang Sensus, BPS menyelenggarakan Sensus Penduduk serentak pada tahun 1961. Sensus Penduduk tersebut merupakan Sensus Penduduk pertama setelah Indonesia merdeka. Sensus Penduduk di tingkat provinsi dilaksanakan oleh Kantor Gubernur, dan di tingkat Kabupaten/Kotamadya dilaksanakan oleh kantor Bupati/Walikota, sedangkan

pada tingkat kecamatan dibentuk bagian yang melaksanakan Sensus Penduduk. Selanjutnya penyelenggara Sensus di Kantor Gubernur dan Kantor Bupati/Walikota ditetapkan menjadi Kantor Sensus dan Statistik Daerah berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor Aa/C/9 Tahun 1965.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.16/1968 yang mengatur tentang Organisasi Dan Tata Kerja BPS di Pusat dan Daerah serta perubahannya menjadi PP No.6/1980, menyebutkan bahwa perwakilan BPS di daerah adalah Kantor Statistik Provinsi dan Kantor Statistik Kabupaten atau Kotamadya. Tentang Organisasi BPS ditetapkan kembali pada PP No 2 Tahun 1992 yang disahkan pada 9 Januari 1992. Selanjutnya, Kedudukan, Fungsi, Tugas, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja BPS diatur dengan Keputusan Presiden Nomor 6

Pada tanggal 26 September 1997 ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, dimana Biro Pusat Statistik diubah namanya menjadi “Badan Pusat Statistik”, dan sekaligus menetapkan tanggal tersebut sebagai “Hari Statistik”. Pada Keputusan Presiden No.86 Tahun 1998 tentang Badan Pusat Statistik, menetapkan bahwa perwakilan BPS di daerah merupakan Instansi Vertikal dengan nama BPS Provinsi, BPS Kabupaten, dan BPS Kotamadya. Serta pada tanggal 26 Mei 1999, ditetapkan PP Nomor 51 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik di Indonesia.

## **B . Penyajian Data**

Peraturan pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah yang menjadi acuan untuk membuat laporan keuangan.

Dengan demikian standar akuntansi pemerintah merupakan persyaratan dan kewajiban yang mempunyai kekuatan hukum dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah disetiap entitas pelaporan sektor publik diseluruh Indonesia yang mana pelaksanaannya mulai berlaku sejak pengelolaan keuangan anggaran pemerintah tahun 2010 .

Berdasarkan permasalahan yang terdapat dalam pelaporan keuangan pemerintah pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten, maka berikut ini penulis akan membahas permasalahan tersebut sebagai berikut:

### **a. Analisis Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten dalam mempertanggungjawabkan keuangan hanya menyajikan Laporan Realisasi

Anggaran, Neraca, laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Hal ini sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Agar semakin jelas, berikut penulis akan menjelaskan contoh laporan keuangan.

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Berikut merupakan tampilan dari laporan realisasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten tahun anggaran 2014-2018.

Table 4.1

## BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KLATEN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PER 31 DESEMBER 2014, 2015, 2016, 2017, DAN 2018

URAIAN	31-Dec-14		31-Dec-15		31-Dec-16		ANGG
	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	
<b>PENDAPATAN</b>							
Penerimaan Negara Bukan Pajak							
	-						
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>							
<b>BELANJA</b>							
<b>Belanja Operasi</b>	3,949,179,000	3,595,774,715	4,359,146,000	4,238,822,129	4,383,671,000	2,306,525,364	4,717,
Belanja Pegawai	5,255,597,000						
Belanja Barang							
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	-	-	
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	92,450,000	90,910,000	92,450,000	90,851,150	153,700,000	103,300,000	96,
<b>Belanja Modal</b>	-						
Belanja Modal Tanah	92,450,000						
Belanja Peralatan dan							

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dalam hal ini Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten tidak membuat laporan perubahan saldo anggaran lebih karena tidak ada perubahan saldo anggaran lebih dikarenakan setiap akhir periode pelaporan saldo harus dinihilkan. Berikut merupakan contoh laporan perubahan saldo anggaran lebih.

Tabel 4.2

**BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KLATEN**  
**LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH**  
TAHUN ANGGARAN 20X1-2020

NO	URAIAN	20X1	20X0
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	XXX	XXX
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	(XXX)	(XXX)
3	Subtotal (1 - 2)	XXX	XXX
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	XXX	XXX
5	Subtotal (3 + 4)	XXX	XXX

c. Neraca

Neraca melaporkan laporan yang memberikan gambaran utuh suatu entitas pada suatu titik waktu. Dalam neraca akan tergambar elemen-elemen yang menyusun entitas tersebut, sehingga neraca sering disebut sebagai potret posisi keuangan suatu entitas. Berikut merupakan tampilan dari laporan neraca Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten tahun anggaran 2014-2018

Tabel 4.3

**BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KLATEN****NERACA**

PER 31 DESEMBER 2014, 2015, 2016, 2017, DAN 2018

URAIAN	31-Dec-14	31-Dec-15	31-Dec-16	31-Dec-17	31-Dec-18
<b>ASET</b>					
<b>ASET LANCAR</b>					
Kas di Bendahara					
Pengeluaran	1,622,100	78,129,000	7,331,281	2,747,000	1,515,900
Persediaan					
Jumlah Aset Lancar					
<b>ASET TETAP</b>	561,820,000	561,820,000	561,820,000	2,248,932,000	2,248,932,000
Tanah	1,664,732,142	1,962,745,865	2,247,767,663	2,158,098,029	2,241,635,975
Peralatan dan Mesin					
Gedung dan Bangunan					
Aset Tetap Lainnya	99,054,854	99,054,854	99,054,854	99,054,854	99,054,854
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	61,092,200	61,092,200	61,092,200	2,063,000	2,063,000
Jumlah Aset Tetap	99,392,154	99,257,234	820,270	-	-
	<b>2,372,902,096</b>	<b>2,842,286,715</b>	<b>2,687,955,849</b>	<b>4,531,834,691</b>	<b>4,421,989,411</b>
<b>ASET LAINNYA</b>					
Aset Tak Berwujud					
Aset Lain-Lain					
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya					
Jumlah Aset Lainnya					
<b>JUMLAH ASET</b>					
<b>KEWAJIBAN</b>					
<b>KEWAJIBAN JANGKA</b>	<b>2,372,902,096</b>	<b>2,842,286,715</b>	<b>2,687,955,849</b>	<b>4,531,834,691</b>	<b>4,421,989,411</b>

#### d. Laporan Operasional

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Berikut ini laporan operasional Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2014-2018



Tabel 4.4  
 BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KLATEN  
 LAPORAN OPERASIONAL  
 PER 31 DESEMBER 2014, 2015, 2016, 2017, DAN 2018

URAIAN	31-Dec-14	31-Dec-15	31-Dec-16	31-Dec-17	31-Dec-18
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>					
<b>PENDAPATAN</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-	850,401	785,868	1,001,664
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>					
<b>BEBAN</b>					
Beban Pegawai	-	4,268,859,442	4,510,300,313	4,439,411,025	5,397,964,331
Beban Persediaan	-	297,052,180	557,291,606	134,607,720	149,659,500
Beban Barang dan Jasa	-	3,744,810,424	6,176,741,703	1,378,686,373	767,993,985
Beban Pemeliharaan	-	240,888,536	236,763,945	249,382,544	309,337,108
Beban Perjalanan Dinas	-	1,328,663,000	3,341,254,000	554,645,000	529,816,816
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	-				
Beban Bantuan Sosial	-				
Beban Penyusutan dan Amortisasi	-				
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-				
Beban Lain-lain	-				
<b>JUMLAH BEBAN</b>					
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	-	-	1,731,148	-	5,699,999
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	-	-	1,638,148	(4,202,781)	5,600,000
Surplus Penjualan Aset Nonlancar	-				
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	-	360,000	-	-	-
Defisit Selisih Kurs SURPLUS	-				

e. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut merupakan penyajian laporan perubahan ekuitas Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten tahun 2014-2018.

Tabel 4.5

**BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KLATEN**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
PER 31 DESEMBER 2014, 2015, 2016, 2017, DAN 2018

URAIAN	31-Dec-14	31-Dec-15	31-Dec-16	31-Dec-17	31-Dec-18
<b>EKUITAS AWAL</b>	-	2,263,466,676	2,702,613,582 (15,083,297,194)	2,549,898,303	4,397,225,640
SURPLUS/DEFISIT LO	-	(10,094,148,021)	-	(6,973,868,802)	(7,347,386,923)
PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN		248,800	-	-	-
Penyesuaian Nilai Aset		248,800	(88,815,413)	-	-
Penyesuaian Nilai Keawajiban		-	-	-	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		15,353,660	(88,815,413)	-	-
LAIN-LAIN		-	-	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN		-	-	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	-	10,517,692,467	15,019,397,328	6,872,715,787	7,164,234,929
KOREKSI NILAI ASET					
<b>EKUITAS AKHIR</b>		<b>2,702,613,582</b>	<b>2,549,898,303</b>	<b>4,397,225,640</b>	<b>4,221,238,366</b>

f. Catatan Atas Laporan Keuangan

1) Catatan Atas Laporan Keuangan tahun 2014

a) Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

– Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 desember 2014 adalah sebesar Rp28,654,000,-. tidak terdapat estimasi pendapatan. Pendapatan Negara dan Hibah Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten terdiri dari Pendapatan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak.

– Belanja pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten per 31 desember 2014 meliputi: Belanja Gaji dan Tunjangan PNS. Realisasi Belanja Pegawai per 31 desember 2014 sebesar Rp3.595.774.715,-. Berdasarkan realisasi belanja per 31 desember

2014 mengalami kenaikan sebesar 25,34 persen dari realisasi belanja per 31 desember 2013.

Hal ini disebabkan antara lain oleh:

- Adanya PP No.34 Tahun 2014 tentang kenaikan gaji 6 persen
- Anggaran Tunjangan Kernerja Tahun 2014 masuk dalam Pagu DIPA BPS Kabupaten Klaten.

– Belanja barang

Realisasi Belanja Barang per 31 desember 2014 dan 2013 adalah masing-masing sebesar Rp1.580.570.611,- dan Rp1.210.784.974,-.

Berdasarkan Realisasi Belanja Barang per 31 desember 2014 mengalami penurunan 1,40 persen dari Realisasi Belanja Barang per 31 desember 2013. Hal ini disebabkan antara lain adanya pada Tahun 2013 ada kegiatan Sensus 2013 dan efisiensi dalam pelaksanaan perjalanan dinas pegawai.

– Belanja modal

Realisasi Belanja Modal per 31 desember 2014 dan 2013 adalah masing-masing sebesar Rp90.910.000,- dan Rp0,-.

b) Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca

– Aset lancar

Nilai Aset Lancar per 31 desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah masing-masing sebesar Rp1.622.100,- dan Rp904.560,-.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

- Kas di bendahara pengeluaran  
Saldo kas di Bendahara Pengeluaran per31 desember 2014 adalah Rp25.000.000,- sedangkang didalam rekening Bendahara Pengeluaran saldo per31 Desember 2013 sebesar Rp0,-
- Persediaan  
Nilai Persediaan per31 desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing adalah sebesar Rp1.301.250,-.dan Rp904.560,-.
- Aset tetap  
Nilai Aset Tetap per31 desember 2014 dan 31 Desember 2013 tersaji sebesar Rp2.271.887.842,-.dan Rp2.337.502.405,-.Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.
- Tanah  
Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten per31 desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp.561.820.000,-.atau tidak ada penambahan atas pengadaan tanah maupun penilaian kembali nilai tanah pada TA 2014. Aset berupa Tanah tersebut terletak di Jl Merapi No.6 yang luasnya 800 m<sup>2</sup>, Klaten dan di Jl. Glatik Mojorejo, Bareng lor, Klaten Utara yang luasnya 178 m<sup>2</sup>.
- Peralatan dan mesin  
Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per31 desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah Rp1.664.732.142,- dan Rp.1.553.489.859,-
- Gedung dan bangunan  
Nilai gedung dan bangunan per 31 desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah Rp1.366.033.200 dan Rp1.336.283.200,-.
- Aset tetap lainnya  
Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah,peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.Saldo Aset Tetap Lainnya per31 desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah Rp81.646.137,- dan Rp71.435.373,-  
Mutasi tambah Aset Tetap Lainnya pada tahun 2014 keseluruhannya berasal dari koleksi buku perpustakaan senilai Rp2.881.519,-.
- Akumulasi penyusutan aset tetap  
Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 desember 2014 dan

31 Desember 2013 adalah masing-masing Rp1.402.343.637,- dan Rp.1.185.526.027,- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)

– Aset lainnya

Nilai Aset Lainnya pada tanggal pelaporan per 31 desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah Rp99.392.154,- dan Rp93.032.354,-. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan, baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap

– Aset tak berwujud

Nilai Saldo aset tak berwujud (ATB) per 31 desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah Rp.99.054.854,- dan Rp.93.032.354,-.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

– Aset lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp.61.092.200,-.

Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten serta dalam proses penghapusan dari BMN.

– Kewajiban jangka pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 desember 2014 dan 31 Desember 2013 tersajisebesar Rp109.435.420,-.danRp904.560,. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

– Utang kepada pihak ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp109.435.420,-.dan Rp904.560,-.

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

– Cadangan persediaan

Nilai Cadangan Persediaan tersaji per 31 desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp.2.263.466.676,- dan

Rp.904.560,-.

Cadangan Persediaan merupakan jumlah ekuitas dana lancar Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten dalam bentuk persediaan.

- Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek Nilai Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek disajikan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp109.435.420,- dan Rp.375.150,-. Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek merupakan bagian dari ekuitas dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.
- Ekuitas dana lancar lainnya  
Nilai Dana Lancar Lainnya disajikan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp.0,-.  
Ekuitas Dana Lancar Lainnya merupakan ekuitas dana lancar berupa kas lainnya dan setara kas yang dikuasai oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten.
- Diinvestasikan dalam aset tetap  
Nilai Diinvestasikan dalam Aset Tetap tersaji per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah masing-masing sebesar Rp2.271.887.842,- dan Rp2.337.502.405,-. Diinvestasikan dalam Aset Tetap merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan dalam bentuk Aset Tetap.
- Diinvestasikan dalam Aset Lainnya  
Nilai Diinvestasikan dalam Aset Lainnya disajikan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah masing-masing sebesar Rp99.392.154,- dan Rp.93.032.354,-.

## 2) Catatan Atas Laporan Keuangan tahun 2015

- a) Penjelasan atas pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
  - Pendapatan  
Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp360.000.000 atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Pendapatan Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak.
  - Belanja  
Realisasi Belanja instansi pada TA 2015 adalah sebesar Rp10.300.865.289 atau 91.83% dari anggaran belanja sebesar Rp11.217.711.000.
  - Belanja pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp4.238.822.129 dan Rp3.595.774.715. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2015 mengalami kenaikan sebesar 1,5 persen dari TA 2014. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

- Adanya Kenaikan Gaji sebanyak 6 %.
- Penambahan remunerasi PNS.

– Belanja barang

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp5.666.957.010 dan Rp1.580.570.611. Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2015 mengalami

kenaikan 258.54% dari Realisasi Belanja Barang per 31 Desember

2014. Hal ini antara lain disebabkan oleh meningkatnya belanja perjalanan dinas dan belanja barang non operasional berupa honor mitra petugas pemetaan, SUPAS dan PBDT 2015.

– Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp90.851.150, mengalami kenaikan sebesar 48.55 persen bila dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2014 sebesar Rp61.160.000. Hal ini disebabkan oleh penambahan peralatan dan mesin berupa mebelair dan pabx.

– Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp304.235.000 dan Rp29.750.000. Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2015 mengalami kenaikan sebesar

90.22 persen dibandingkan Realisasi per 31 Desember 2014. Hal ini dikarenakan Belanja Gedung dan Bangunan pada TA 2015 ini berasal dari Pembangunan Rumah Dinas.

b) Penjelsan atas pos-pos Neraca

– Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp78.129.000 dan Rp1.622.100.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan

operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

– Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Badan Pusat Statistik Kab. Klaten per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebesar Rp561.820.000 dan Rp561.820.000. Tidak ada perubahan nilai aset tanah.

– Peralatan dan mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah Rp1.962.745.865 dan Rp1.664.732.142.

– Gedung dan bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah Rp1.1.670.268.200 dan Rp1.366.033.200. Jadi ada mutasi tambah senilai Rp.304.235.000 yaitu berupa pembangunan rumah dinas sehingga aset gedung dan bangunan bertambah.

– Aset tetap lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per

31 Desember 2015 dan 2014 adalah yaitu sebesar Rp.86.104.837

Rp81.646.137. Ada mutasi tambah atas aset tetap lainnya ini sebesar Rp.4.458.700 untuk Tahun 2015 disebabkan adanya kiriman buku baik dari BPS Kab/kota, Propinsi maupun dari BPS RI

– Akumulasi penyusutan aset tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2015 dan

2014 adalah masing-masing Rp1.616.038.421 dan Rp1.402.343.637. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

– Aset tak berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sama senilai Rp99.054.854 karena tidak ada mutasi tambah atau kurang.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

– Aset lain-lain



Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sama nilainya sebesar Rp61.092.200 karena tidak ada mutasi tambah atau kurang .Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

- Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya  
Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah Rp60.889.820. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.
- Utang kepada pihak ketiga  
Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp139.673.133 dan Rp109.435.420. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Badan Pusat Statistik Kab.
- Ekuitas  
Ekuitas per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp2.702.613.582 dan Rp2.263.466.676. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.
- c) Penjelasan atas pos-pos laporan operasional
  - Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak  
Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.
  - Beban Pegawai  
Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp1.670.089.817 dan Rp0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
  - Beban Persediaan  
Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp297.052.180 dan Rp0. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.
  - Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp3.744.810.424 dan Rp0. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

– Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan yang berakhir 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp240.888.536 dan Rp0.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada kedalam kondisi normal.

– Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp1.328.663.000 dan Rp0. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

– Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp214.234.439 dan Rp0. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

– Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

– Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

d) Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

– Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp2.263.466.676 dan Rp0

– Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebesar (Rp10.094.148.021) dan Rp0. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/deficit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luarbiasa.

– Penyesuaian Nilai Aset

Mencatat penyesuaian nilai persediaan yang disebabkan kebijakan akuntansi pemerintah pusat menggunakan metode penilaian persediaan yaitu harga perolehan terakhir. Penyesuaian nilai aset per

31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp.248.800 dan Rp0.

– Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

– Koreksi Nilai Aset Tetap

Koreksi Atas Nilai Perolehan Aset Tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp15.353.660 dan Rp0.

– Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp2.702.613.582 dan Rp0

3) Catatan Atas Laporan Keuangan tahun 2016

a) Penjelasan atas pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

– Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp28.654.000 atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Pendapatan Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak

– Belanja

Realisasi Belanja instansi per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp5.176.345.326

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp3.595.774.715 dan Rp1.779.357.987. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

– Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per 31 desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp1.580.570.611 dan Rp1.588.463.106.

– Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 desember 2016 adalah sebesar Rp90.910.000,

– Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal per 31 desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp17.127.500.

b) Penjelasan atas pos-pos Neraca

– Kas di bendahara pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp40.000.000 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara.

– Persediaan

Nilai Persediaan per 31 desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing adalah sebesar Rp7.331.281 dan Rp78.129.000. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

– Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Badan Pusat Statistik Kab. Klaten per 31 desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp561.820.000 dan Rp561.820.000. Tidak ada perubahan nilai aset tanah.

– Peralatan dan mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah Rp2.247.767.663 dan Rp1.962.745.865.

– Gedung dan bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 adalah Rp1.670.268.200 dan Rp1.670.268.200. Jadi tidak ada mutasi aset gedung dan bangunan.

– Aset tetap lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per

31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah Rp90.077.237 dan

Rp.86.104.837. Tidak ada mutasi atas aset tetap lainnya ini.

– Akumulasi penyusutan aset tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2016 dan

31 Desember 2015 adalah masing-masing Rp1.890.128.802 dan Rp1.616.038.421. Akumulasi

Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

– Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Juni 2016 dan 31 Desember

2015 adalah sama senilai Rp99.054.854 karena tidak ada mutasi tambah atau kurang.

– Aset lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sama nilainya

sebesar Rp61.092.200 karena tidak ada mutasi tambah atau kurang. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

– Akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

adalah Rp.159.326.784 dan Rp60.889.820. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

– Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2016 dan 31

Desember 2015 masing-masing sebesar Rp.138.057.546 dan Rp139.673.133. Utang kepada

Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

– Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 30 Juni 2016 dan 31 Desember

2015 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

– Ekuitas

Ekuitas per 31 desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp.2.549.898.303 dan Rp2.702.613.582. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

c) Penjelasan atas pos-pos laporan operasional

– Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp850.401 dan Rp0.

– Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp.4.510.300.313 dan Rp4.268.859.442. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

– Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan per 31 desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp.557.291.606 dan Rp297.052.80. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-

barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

– Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp6.176.741.703 dan Rp3.744.810.424. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

– Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan yang berakhir 31 desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp236.763.945 dan Rp240.888.536. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada kedalam kondisi normal.

– Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp3.341.254.000 dan Rp1.328.663.000. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

– Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 desember 2016 dan

2015 adalah masing-masing sebesar Rp263.434.176 dan Rp214.234.439. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan

(*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

– Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

– Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

d) Penjelasan atas pos-pos laporan perubahan ekuitas

– Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp.2.702.613.582 dan Rp2.263.466.676.

– Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir per 31 desember

2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebesar (Rp15.083.297.194) dan (Rp10.094.148.021).

Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luarbiasa.

– Penyesuaian Nilai Aset

Mencatat penyesuaian nilai persediaan yang disebabkan kebijakan akuntansi pemerintah pusat menggunakan metode penilaian persediaan yaitu harga perolehan terakhir. Penyesuaian nilai aset per

31 desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp248.800.

– Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk per 31 desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

– Koreksi Nilai Aset Tetap



Koreksi Atas Nilai Perolehan Aset Tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk per 31 Desember 2016 dan 31 Desember

2015 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp15.353.660.

– Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp2.549.898.303 dan Rp2.702.613.582.

4) Catatan Atas Laporan Keuangan tahun 2017 a) Penjelasan atas pos-pos realisasi anggaran

– Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember

2017 adalah sebesar Rp785.686 atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Pendapatan Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak.

– Belanja

Realisasi Belanja instansi per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp6.853.534.437 atau 92.10% dari anggaran belanja sebesar Rp7.441.203.000.

– Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp4.442.869.870 dan Rp4.511.640.350. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja per 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar 1.52 persen dari Tahun 2016.

– Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp2.315.455.567 dan Rp9.826.427.948. Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2017 mengalami penurunan 94.76% dari Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2016. Hal ini antara lain disebabkan oleh belanja barang non operasional karena ada kegiatan Sensus Ekonomi 2016 yang melibatkan 1730 petugas.

– Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2017 dan 31 Desember

2016 adalah masing-masing sebesar Rp95.209.000 dan Rp141.648.000. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

– Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp0, mengalami penurunan sebesar 100 persen bila dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2016 sebesar Rp141.648.000. Hal ini disebabkan oleh karena ditahun 2017 tidak ada pagu belanja modal peralatan dan mesin.

– Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp95.209.000 dan Rp0. Realisasi Belanja Modal pada per 31 Desember 2017 mengalami kenaikan sebesar 100 persen dibandingkan Realisasi per 31 Desember 2016. Hal ini dikarenakan Belanja Gedung dan Bangunan pada TA 2017 ini berasal dari Rehabilitasi pagar gedung kantor.

b) Penjelasan atas pos-pos neraca

– persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp2.747.000 dan Rp7.331.281. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

– Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Badan Pusat Statistik Kab. Klaten per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp2.248.932.000 dan Rp561.820.000.

– Peralatan dan mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah Rp2.158.098.029 dan Rp2.247.767.663

– Gedung dan bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah Rp2.001.028.000 dan Rp1.670.268.200.

– Aset tetap lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah Rp91.389.237 dan Rp90.077.237. Ada mutasi atas aset tetap lainnya ini.

- Akumulasi penyusutan aset tetap  
Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing Rp.1.970.359.575. dan Rp1.890.128.802. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).
  - Aset tak berwujud  
Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per31 Desember 2017 dan 2016 adalah sama senilai Rp99.054.854 karena tidak ada mutasi tambah atau kurang. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.
  - Aset lain-lain  
Saldo Aset Lain-lain per31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing
    - masing nilainya sebesar Rp.2.063.000 dan Rp61.092.200. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.
  - Akumulasi penyusutan dan amortisasi aset tetap lainnya  
Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah (Rp.101.117.854) dan (Rp.159.326.784). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.
  - Utang kepada Pihak Ketiga  
Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp134.609.051 dan Rp138.057.546. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.
  - Ekuitas  
Ekuitas per31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp4.397.225.640 dan Rp2.549.898.303. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.
- c) Penjelasan atas pos-pos laporan operasional
- Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp785.868 dan Rp850.401.

– Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp4.439.411.025 dan Rp4.510.300.313. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

– Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp134.607.720 dan Rp503.546.566. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

– Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp1.378.686.373 dan Rp6.176.741.703. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

– Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp1.378.686.373 dan Rp6.176.741.703. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

– Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan pada Tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp249.382.544 dan Rp236.763.945. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada kedalam kondisi normal.

– Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp554.645.000 dan Rp3.341.254.000. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

– Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp213.719.227 dan Rp263.434.176. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

– Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

– Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

d) Penjelasan atas pos-pos laporan perubahan ekuitas

– Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.2.549.898.303 dan Rp.2.702.613.582.

– Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir Tahun 2017 dan 2016 adalah sebesar (Rp6.973.868.802) dan (Rp15.083.297.194). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/deficit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luarbiasa.

– Penyesuaian Nilai Aset

Mencatat penyesuaian nilai persediaan yang disebabkan kebijakan akuntansi pemerintah pusat menggunakan metode penilaian persediaan yaitu harga perolehan terakhir. Penyesuaian nilai aset Tahun 2017 dan 2016 adalah sama sebesar Rp.0.

– Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk per 30Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

– Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk tahun 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp1.947.168.352 dan Rp0.

– Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Atas Nilai Perolehan Aset Tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk Tahun 2017 dan 2016 adalah masing- masing sebesar Rp1.312.000 dan (Rp88.815.413).

– Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Entitas untuk tahun 2017 dan 2016 adalah masing- masing sebesar Rp6.872.715.787 dan Rp15.019.397.328. Transaksi antar entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

– Diterima dari Entitas Lain(DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari entitas lain/ditagihkan ke entitas lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada Tahun 2017, DDEL sebesar (Rp785.868) sedangkan DKEL sebesar(Rp6.853.534.437).

– Tranfer Masuk/Tranfer Keluar

Tranfer masuk/keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

– Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing- masing sebesar Rp4.397.225.640 dan Rp2.549.898.303.

5) Catatan Atas Lapora Keuangan tahun 2018

a) Penjelasan atas pos-pos laporan realisasi anggaran

Selama periode berjalan, Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

– Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember

2018 adalah sebesar Rp6.701.663 atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Pendapatan Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak.

– Belanja

Realisasi Belanja instansi per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp7.141.969.816 atau 93.70% dari anggaran belanja sebesar Rp7.622.470.000. Dibandingkan dengan TA 2017, Realisasi Belanja TA 2018 mengalami Kenaikan sebesar 4.21% dibandingkan realisasi

belanja pada tahun pelaporan. Hal ini disebabkan antara lain Karena pada tahun 2018 ada kenaikan tunjangan kinerja sebanyak 80% dengan TMT Bulan Februari 2018 sehingga ada rapelan.

– Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp5.331.853.737 dan Rp4.442.869.870. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja per 31 Desember 2018 mengalami penurunan sebesar 20.01 persen dibanding Tahun 2017. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2018 ada kenaikan tunjangan kinerja sebanyak 80% dengan TMT Bulan Februari 2018 sehingga ada rapelan.

– Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp1.740.681.729 dan Rp2.315.455.567. Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2018 mengalami penurunan 24.82% dari Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2017. Hal ini antara lain disebabkan oleh belanja barang non operasional yaitu adanya Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS) dan Survei Potensi Desa (PODES) yang melibatkan banyak Mitra.

– Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp69.434.350 dan Rp95.209.000. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

– Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp69.434.350, mengalami penurunan sebesar 100 persen bila dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2017 sebesar Rp0. Hal ini disebabkan oleh karena ditahun 2018 ada pagu belanja modal peralatan dan mesin.

– Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp95.209.000. Realisasi Belanja Modal pada per 31 Desember 2018 mengalami penurunan sebesar

100 persen dibandingkan Realisasi per 31 Desember 2017. Hal ini dikarenakan Belanja Gedung dan Bangunan pada TA 2017 ini berasal dari Rehabilitasi pagar gedung kantor.

b) Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca

– Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp1.515.900 dan Rp2.747.000. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

– Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Badan Pusat Statistik Kab. Klaten per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp.2.248.932.000.

– Peralatan dan mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Rp2.241.635.975.

Penambahan Aset Peralatan dan Mesin Berupa:

- Tranfer masuk berupa printer pemetaan sebanyak 1 unit dari BPS Propinsi Jawa Tengah senilai Rp.14.103.596
  - Pembelian Lap Top sebanyak 5 unit senilai Rp.31.294.000
  - Pembelian PC Unit sebanyak 4 Unit senilai Rp.19.896.000
  - Pembelian Printer colour sebanyak 3 unit senilai Rp.13.782.300
  - Pembelian external sebanyak 3 Unit senilai Rp.4.462.050

– Gedung dan bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Rp2.001.028.000.

– Aset tetap lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Rp.98.553.957 dan Rp.91.389.237.

– Akumulasi penyusutan aset tetap



Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing (Rp.2.169.676.421) dan (Rp.1.970.359.575). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

– Aset tak berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sama senilai Rp99.054.854 karena tidak ada mutasi tambah atau kurang.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

– Aset lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sama nilainya sebesar Rp.2.063.000. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

– Akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sama senilai (Rp.101.117.854). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

– Utang kepada pihak ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp.200.751.045 dan Rp134.609.051. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

– Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.4.221.238.366 dan Rp4.397.225.640. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

c) Penjelasan atas pos-pos laporan operasional

– Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember

2018 dan 2017 adalah sebesar Rp1.001.664 dan Rp785.868.

– Beban pegawai

Jumlah Beban Pegawai per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp5.397.964.331 dan Rp4.439.411.025. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

– Beban persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp149.659.500 dan Rp134.607.720. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

– Beban barang dan jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp767.993.985 dan Rp1.378.686.373. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

– Beban pemeliharaan

Beban Pemeliharaan pada per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp309.337.108 dan Rp249.382.544. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada kedalam kondisi normal.

– Beban perjalanan dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp529.816.816 dan Rp554.645.000. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

– Beban penyusutan dan amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp199.316.486 dan Rp213.719.227. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

– Kegiatan non operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

- Pos luar biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

d) Penjelasan atas pos-pos laporan perubahan ekuitas

- Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2018 dan 1 Januari 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.4.397.225.640 dan Rp.2.549.898.303.

- Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar (Rp7.347.386.923) dan (Rp6.973.868.802). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/deficit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

- Penyesuaian Nilai Aset

Mencatat penyesuaian nilai persediaan yang disebabkan kebijakan akuntansi pemerintah pusat menggunakan metode penilaian persediaan yaitu harga perolehan terakhir. Penyesuaian nilai aset Tahun 2018 dan 2017 adalah sama sebesar Rp.0.

- Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk per 31 Desember 2019 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

- Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Atas Nilai Perolehan Aset Tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp7.164.720 dan Rp1.312.000.

- Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Entitas untuk 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp7.164.234.929 dan Rp6.872.715.787. Transaksi antar entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Diterima dari entitas lain/ditagihkan ke entitas lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode

31 Desember 2018, DDEL sebesar (Rp6.701.663) sedangkan DKEL sebesar Rp7.141.969.816. Tranfer masuk/keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Tranfer masuk per 3 Desember 2018 sebesar Rp28.966.776.

– Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing- masing sebesar Rp4.221.238.366 dan Rp4.397.225.640.

Dalam menyajikan laporan keuangan Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten mangacu pada Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 yang mencakup tujuh komponen laporan keuangan yaitu: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

a. Laporan realisasi anggaran

Dalam laporan realisasi anggaran terdapat beberapa unsur antara lain yaitu pendapatan LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Namun dalam laporan ini Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten tidak mempunyai pendapatan karena tidak memiliki sumber ekonomi dan untuk melakukan suatu kegiatan Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten mendapatkan dana dari pemerintah berupa ganti uang.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten tidak menerapkan laporan ini karena tidak ada perubahan saldo anggaran lebih dikarenakan setiap akhir periode pelaporan saldo harus dinihilkan.

c. Neraca

Dalam laporan neraca ini Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten menggambarkan mengenai unsur yang terdapat dalam neraca berupa aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

d. Laporan Operasional

Laporan operasional yang terdapat dalam Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan yang mencakup unsur beban, kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

e. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas dalam Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten memuat informasi tentang kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

f. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan dalam Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten meliputi penjelasan naratif atau rincian angka yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Berdasarkan komponen-komponen laporan keuangan yang tertera dalam Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010, Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten tidak membuat Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih karena tidak ada perubahan saldo anggaran lebih dikarenakan setiap akhir periode pelaporan anggaran harus nol (0) atau dinihilkan dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten tidak menerapkan Laporan Arus Kas karena telah menggunakan aplikasi untuk mengolah laporan ini. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten telah memenuhi standar akuntansi dalam Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010.

### **C. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Untuk membuat suatu gambaran tentang belanja kinerja keuangan pemerintah daerah maka kita harus mengetahui anggaran belanja itu sendiri selama satu tahun.

Data yang dikumpulkan berupa laporan realisasi anggaran pada badan pusat statistik kabupaten klaten dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Berikut ini akan dijelaskan bagaimana tingkat keefisienan anggaran dan belanja badan pusat statistik kabupaten klaten.

Analisis belanja daerah sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien, dan efektifitas. Sejauh mana pemerintah daerah telah melakukan efisiensi anggaran, menghindari peneluaran yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran. Dengan digunakannya sistem penganggaran berbasis kinerja, semangat untuk melakukan efisiensi (penghematan) atas setiap belanja mutlak harus tertanam dalam jiwa setiap pegawai pemerintah daerah. Pemerintah tidak perlu lagi berorientasi untuk menghabiskan anggaran yang berakibat terjadinya pemborosan anggaran, tetapi hendaknya berorientasi pada output dan outcome dari anggaran. Berikut akan dijelaskan kondisi keuangan Badan Pusat Statistik

Kabupaten Klaten periode tahun 2014-2018 ditinjau dari aspek analisis varians, realisasi belanja operasi terhadap total belanja, realisasi belanja modal terhadap total belanja, dan efisiensi belanja.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Analisis Varians Belanja**

Dalam analisis varians belanja terdapat selisih anggaran belanja yang dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu 1) selisih disukai (*favourable variance*) dan 2) selisih tidak disukai (*unfavourable variance*). Dalam hal realisasi belanja lebih kecil dari anggarannya disebut *favourable variance*, sedangkan jika realisasi belanja lebih besar dari anggarannya maka dikategorikan *unfavourable variance*. Hasil

perhitungan varians belanja akan direkapitulasi dan diukur sesuai kriteria dengan menggunakan tabel berikut:

Tabel 4.6

Perhitungan Varians (Selisih) Belanja Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten

Tahun 2014-2018

Tahun	Realisasi Belanja	Anggaran Belanja	Rasio Varians Belanja
(1)	(2)	(3)	(4)=(2-3)
2014	5,267,255,326	6,032,047,000	-764,791,674
2015	10,300,865,289	11,217,711,000	-916,845,711
2016	11,452,578,504	16,326,092,000	-4,873,513,496
2017	6,853,534,437	7,441,203,000	-587,668,563
2018	7,141,969,816	7,622,470,000	-480,500,184

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa analisis varians belanja menunjukkan bahwa secara umum kinerja keuangan belanja Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten dapat dikatakan sudah baik karena selisih anggaran belanja dengan realisasi bersaldo negatif. Hal ini mengindikasikan adanya efisien atau penghematan anggaran dengan rata-rata anggaran belanja terserap 87.02%. jumlah penghematan tersebut jika dilihat dari presentasinya memang tidak begitu besar, namun jika dilihat dari nilainya cukup signifikan. Realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu Rp.11,452,578,504, sedangkan realisasi terendah terjadi pada tahun 2014 sebesar Rp.5,267,255,326. Hasil ini juga mendukung pendapat yang dikemukakan oleh Mahmudi (2019:157) yaitu pemerintah dikatakan memiliki kinerja keuangan belanja yang baik apabila realisasi belanja tidak melebihi dari yang ditargetkan.

## 2. Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja

Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja. Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja yang dialokasikan untuk belanja operasi. Belanja operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga belanja operasi ini sifatnya pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang. Pada umumnya proporsi belanja operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60-90%.

Tabel 4.8

Perhitungan Belanja Operasi Terhadap Total Belanja Badan Pusat Statistik  
Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018

tahun	total realisasi belanja operasi	total belanja	rasio belanj	kriteria kemampuan
1	2	3	(4)=(2:3 x	5
2014	5,176,345,326	#####	98.	
2015	9,905,779,139	#####	96.	
2016	11,349,278,504	#####	99.	
2017	6,758,325,437	#####	98.	
2018	7,072,535,466	#####	99.	

$$\text{Belanja Operasi 2014} = \frac{5,176,345,326}{5,267,255,326} \times 100\% = 98.27$$

$$\text{Belanja Operasi 2015} = \frac{9,905,779,139}{10,300,865,289} \times 100\% = 96.16$$

$$\text{Belanja Operasi 2016} = \frac{11,349,278,504}{11,452,578,504} \times 100\% = 99.10$$

$$\text{Belanja Operasi 2017} = \frac{6,758,325,437}{6,853,534,437} \times 100\% = 98.61$$

$$\text{Belanja Operasi 2018} = \frac{7,072,535,466}{7,141,969,816} \times 100\% = 99.03$$

Dari tabel dan perhitungan diatas dapat dilihat kinerja keuangan belanja Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten menunjukkan tingkat belanja operasi pada tahun 2014 adalah 98.27%, tahun 2015 sebesar 96.16%, tahun 2016 sebesar 99.10%, tahun 2017 sebesar 98.61%, dan tahun 2018 sebesar 99.03%. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa sebagian besar dana dialokasikan untuk belanja operasi. Hal ini ditunjukkan dengan angka rata-rata sebesar 98.24% untuk rasio belanja operasi terhadap total belanja. Rasio belanja operasi terhadap total belanja tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 99.03%, sedangkan rasio belanja operasi terhadap total belanja terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu 96.16%. Rasio ini dikatakan baik karena proporsi terjadi diatas 60%, hal ini sesuai pendapat Mahmudi (2019:162) yang mengutarakan bahwa rasio belanja terhadap total belanja dikatakan baik apabila proporsi berada diantara 60-90%.

### 3. Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja

Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja. Berbeda dengan belanja operasi yang bersifat pendek dan rutin, pengeluaran belanja yang dilakukan saat ini akan memberikan manfaat jangka menengah dan panjang. Pada umumnya proporsi belanja modal terhadap total belanja adalah antara 5-20%.

Berikut merupakan tabel standar rasio belanja operasi menurut Mahmudi Tahun 2019 yang terdapat dalam tabel dibawah ini: Tabel 4.9

**Tabel Kriteria Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja**

Kriteria Efisiensi	Presentase Belanja Modal
< 5%	Kurang Baik
5-20%	Baik

*Sumber : Mahmudi (2019)*



Hasil perhitungan belanja modal akan direkapitulasi sebagai berikut:

Tabel 4.10

Perhitungan Belanja Modal Terhadap Total Belanja Badan Pusat Statistik  
Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018

Tahun	Total Realisasi Belanja Modal	Total Belanja	Rasio Belanja Modal
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3 X 100%)
2014	90,910,000	5,267,255,326	1.73
2015	395,086,150	10,300,865,289	3.84
2016	103,300,000	11,452,578,504	0.90
2017	95,209,000	6,853,534,437	1.39
2018	69,434,350	7,141,969,816	0.97

	90,910,000		
belanja modal 2014=	_____	X100% =	1.73
belanja modal 2015=	5,267,255,326		
belanja modal 2016=	<u>395,086,150</u>		
belanja modal 2017=	_____	X100% =	3.84
	10,300,865,289		
	<u>103,300,000</u>		
belanja modal 2018=	_____	X100% =	0.90
	11,452,578,504		
	95,209,000		
		X100% =	1.39
	6,853,534,437		
	69,434,350		
		X100% =	0.97
	7,141,969,816		

Dari tabel dan perhitungan diatas dapat dilihat kinerja keuangan belanja Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten tahun 2014-2018 dilihat dari keserasian belanja, secara umum dapat dikatakan sebagian dana belanja dialokasikan untuk belanja modal. Hal ini ditunjukkan dengan kondisi perhitungan belanja modal pada tahun 2014 sebesar 1.73%, tahun 2015 sebesar 3.84%, tahun 2016 sebesar 0.90%, tahun 2017 sebesar 1.39%, tahun 2018 sebesar 0.97% yang memiliki rata-rata sebesar 1.76%. Rasio belanja modal terhadap total belanja tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 3.84%, sedangkan rasio belanja modal terhadap total belanja terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 0.90%. Rasio belanja modal terhadap total belanja pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten ini memiliki proporsi yang kurang baik. Hal ini ditunjukkan dengan seluruh proporsi dari tahun 2014-2018 tidak ada proporsi yang mencapai angka 5%. Sedangkan pendapat yang dikemukakan oleh Mahmudi (2019:163) proporsi belanja modal terhadap total belanja adalah antara 5-20%.

4. Rasio efisiensi

Untuk mengukur tingkat efisiensi belanja Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten dapat diukur dengan menggunakan kriteria atau standar efisiensi menurut Mahsum Tahun 2018 yang terdapat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.11

**Tabel Kriteria Efisiensi Belanja**

<b>Kriteria Efisiensi</b>	<b>Presentase Efisiensi</b>
100% Keatas	Tidak Efisien
100%	Efisien Berimbang
Kurang Dari 100%	Efisien

*Sumber : Mahsun (2018)*

Tingkat efisiensi belanja Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten sudah sangat bagus, dimana pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 tingkat efisiensi belanja Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten memiliki kriteria yang sangat efisien.

Data tersebut ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.12

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	Rasio Efisiensi	Kriteria
2014	6,032,047,000	5,267,255,326	87.32%	Efisien
2015	11,217,711,000	10,300,865,289	91.83%	Efisien
2016	16,326,092,000	11,452,578,504	70.15%	Efisien
2017	7,441,203,000	6,853,534,437	92.10%	Efisien
2018	7,622,470,000	7,141,969,816	93.70%	Efisien

Berikut merupakan penghitungan dari rasio efesiensi belanja Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten tahun anggaran 2014-2018:

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja 2014} = \frac{5,267,255,326}{6,032,047,000} \times 100\% = 87.32\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja 2015} = \frac{10,300,865,289}{11,217,711,000} \times 100\% = 91.83\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja 2016} = \frac{14,479,716,298}{15,543,227,000} \times 100\% = 93.16\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja 2017} = \frac{6,853,534,437}{7,441,203,000} \times 100\% = 92.10\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja 2018} = \frac{7,141,969,816}{7,622,470,000} \times 100\% = 93.70\%$$

Dari tabel dan perhitungan diatas tersebut memberikan gambaran secara jelas tentang kondisi efesiensi belanja pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten menunjukkan bahwa pada tahun 2014 tingkat efesiensi belanjanya adalah sebesar 87.32%, tahun 2015 sebesar 91.83%, tahun

2016 sebesar 93.16%, tahun 2017 sebesar 92.10%, tahun 2018 sebesar 93.70%. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa Realisasi Anggaran Belanja Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten tidak terdapat angka melebihi anggaran belanja. Pada tahun 2014-2018 semua angka pada rasio efisiensi menunjukkan angka di bawah 100% sehingga dapat diartikan bahwa tidak ada pemborosan dalam penganggaran belanja untuk lima tahun tersebut.

Untuk mengukur tingkat efesiensi belanja Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten dapat diukur dengan menggunakan kriteria atau standar efesiensi menurut Mahsum Tahun 2018 adalah  $< 100\%$  berarti efisien, =

$100\%$  berarti efisiensi berimbang,  $> 100\%$  berarti tidak efisien. Dibandingkan dengan standar keefesiensian tersebut ditinjau dari aspek kriteria efesiensi yang ditetapkan Mahsum 2018 dapat dijelaskan bahwa tingkat efisiensi belanja Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten secara umum adalah efisien, yang berarti realisasi belanja tidak melebihi dari anggaran belanja.

Tingkat efisien yang dicapai dari hasil yang ditunjukkan selama lima tahun terakhir tersebut, disebabkan karena masih berada pada interval yang ditetapkan Mahsum 2018. Dengan demikian menunjukkan bahwa keuangan pada Badan Pusat Statistik dilihat dari aspek efesiensi belanja sudah hemat/efisien. Berikut merupakan hasil analisis pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten tahun 2014-2018:

Tabel 4.13

Hasil Analisis Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten

Keterangan	Tahun					Hasil
	2014	2015	2016	2017	2018	
Analisis Varians Belanja	-764,791,674	-916,845,711	-4,873,513,496	-587,668,563	-480,500,184	Negatif yang berarti adanya efisiensi atau penghematan anggaran
Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja	98.27	96.16	99.1	98.61	99.03	Baik karena proporsi berada diatas 60%
Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja	1.73	3.84	0.9	1.39	0.97	Kurang baik karena proporsi menunjukkan kurang dari 5%
Rasio Efisiensi	87.32	91.83	70.15	92.1	93.7	Efisien dengan proporsi $< 100\%$

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berdasarkan uraian penjelasan dan analisa yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis perlu menarik suatu kesimpulan dan dari kenyataan yang ditemui sepanjang analisa dalam kasus ini, maka akan diajukan pula beberapa saran yang mungkin dapat diperlukan oleh pemerintah pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten dalam pelaporan keuangannya.

#### **A. Kesimpulan**

1. Laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan tersebut harus disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, namun pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten hanya menyajikan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan sedangkan untuk Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Laporan Arus Kas badan pusat statistik kabupaten klaten tidak membuat laporan tersebut.
2. Kinerja keuangan Belanja Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten dilihat dari varians belanja selama tahun 2014-2018, dapat dikatakan sudah baik karena selisih anggaran belanja dengan realisasi bersaldo negatif. Hal ini mengindikasikan adanya efisien atau penghematan anggaran dengan rata-rata anggaran belanja terserap 87.02%.
3. Kinerja keuangan belanja Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten dilihat dari rasio belanja operasi terhadap total belanja, dapat dikatakan baik karena proporsi terjadi diatas 60%, hal ini sesuai pendapat Mahmudi (2019:162) yang mengutarakan bahwa rasio belanja terhadap total belanja dikatakan baik apabila proporsi berada diantara 60-90%. Secara umum anggaran belanja terlihat bahwa sebagian besar dana belanja dialokasikan untuk belanja operasi. Selama tahun 2014-2018 rata-rata belanja operasi terhadap total belanja yaitu sebesar 98.24%.
4. Kinerja keuangan belanja Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten dilihat dari rasio belanja modal terhadap total belanja dikatakan kurang baik. Hal ini ditunjukkan dengan seluruh proporsi dari tahun 2014-2018 tidak ada proporsi yang mencapai angka 5%. Sedangkan pendapat yang dikemukakan oleh Mahmudi (2019:163) proporsi belanja modal terhadap total belanja adalah antara 5-20%. Secara umum anggaran belanja terlihat bahwa sebagian kecil dana belanja dialokasikan untuk belanja modal. Selama tahun 2014-2018 rata-rata belanja modal terhadap total belanja yaitu sebesar 1.76%.
5. Laporan keuangan Pemerintah Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten dinilai dari Analisis Efisiensi Belanja Daerah, dikatakan telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang

dari 100 persen. Sebaliknya jika lebih dari 100 persen mengindikasikan terjadinya pemborosan anggaran (Mahmudi, 2019). Analisis Efisiensi Belanja menunjukkan bahwa Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten telah melakukan efisiensi belanja untuk tahun 2014-2018. Hal ini ditunjukkan dengan Realisasi Anggaran Belanja Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten yang tidak terdapat angka melebihi anggaran belanja. Hasil ini mendukung pendapat Mahmudi (2019:164) jika angka yang dihasilkan dari rasio kurang dari 100% maka dinilai telah melakukan efisiensi anggaran.

## **B. Saran**

Dari beberapa kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten Dalam membuat laporan keuangan seperti yang diatur pada Peraturan Pemerintah dalam Standar Akuntansi Pemerintah, Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten harus membuat penyajian Laporan Arus Kas yang menyajikan informasi laporan keuangan tentang penerimaan dan pengeluaran kas dalam satu periode tertentu agar pihak ekstern bisa mendapatkan data tersebut guna kepentingan penelitian.
2. Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten seharusnya memaksimalkan anggaran belanja modal agar bisa mencapai proporsi yang ideal yaitu sebesar 5-20%.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan agar menambahkan periode tahun penelitian agar lebih akurat dalam menganalisis kinerja keuangan Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten. Selanjutnya disarankan memperluas lingkup wilayah penelitian, karena penelitian ini mengambil satu kabupaten di provinsi Jawa Tengah yaitu Kabupaten Klaten.

<https://klatenkab.bps.go.id/menu/1/tentang-bps>.

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 43 Tahun 2001 tentang  
Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil. Mahmudi. 2011.

*Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press

Mahmudi. 2019. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN

Mahsun. 2018. *Pengukuran Kerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFÉ.

Mursyidi. 2009. *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Bandung:PT.Refika  
Aditama.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

Prasetya, Gede Edy. 2005. *Penyusunan Dan Analisis Laporan Keuangan  
Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Andi.

Priono Dan Marnis. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Sidoarjo: Zifatama Publisher.

Rachmat. 2010. *Akuntansi Pemerintahan*. Bandung:Pustaka Setia

Sarwono, Jonathan. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*.  
Yogyakarta: Graha Ilmu.

Umi Riyanti. 2011. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Pada Dinas Bina Marga Dan Sumber  
Daya Air Kabupaten Pelalawan. Skripsi. Riau:Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim



**PEDOMAN WAWANCARA**  
**(INTERVIEW GUIDE)**

**A. pedoman wawancara untuk Bendahara Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten**

Teknik pengumpulan data	Wawancara
Kegiatan	Mencari informasi mengenai profil Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten serta pembukuan laporan keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten
Lokasi	Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten
Sumber data	Primer
Peneliti	Arie Rachma Putri
Informan	Iswadi

Pertanyaan:

1. Bagaimana kondisi profil Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten?
2. Bagaimana struktur organisasi di Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten?
3. Berkaitan dengan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah bagaimana penerapan dalam menyusun laporan keuangan pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten?
4. Siapa saja petugas penyusunan laporan keuangan?

**BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KLATEN**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**PER 31 DESEMBER 2014**

URAIAN	CATATAN	TA 2014		% thd Anng	TA 2013
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
<b>A. Pendapatan Negara dan Hibah</b>	<b>B.1.</b>				
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.				
<b>Jum Pendpt Negara &amp; Hibah</b>					
<b>B. Belanja Negara</b>	<b>B.2.</b>				
1. Belanja Pegawai	B.2.1.				
2. Belanja Barang	B.2.2.				
3. Belanja Modal	B.2.3.				
4. Belanja Sosial	B.2.4.				
<b>Jumlah Belanja Negara</b>					

**BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KLATEN**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**PER 31 DESEMBER 2015**

URAIAN	CATATAN	31-Dec-15		% thd	31-Dec-14
		ANGGARAN	REALISASI	Angg	REALISASI
<b>PENDAPATAN</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1			0.00	
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>				<b>0.00</b>	
<b>BELANJA</b>	<b>B.2.</b>				
<b>Belanja Operasi</b>					
Belanja Pegawai	B.3			97.24	
Belanja Barang	B.4			87.84	
Belanja Bantuan Sosial	B.5			0.00	
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>				<b>91.63</b>	
<b>Belanja Modal</b>					
Belanja Modal Tanah	B.6			0.00	
Belanja Peralatan dan Mesin	B.7			98.27	
Belanja Gedung dan Bangunan	B.8			96.58	
Belanja Jalan, Irigasi, Jaringan	B.9			0.00	
Belanja Modal Lainnya	B.10			0.00	
<b>Jumlah Belanja Modal</b>				<b>96.97</b>	
<b>JUMLAH BELANJA</b>					

**BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KLATEN**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**PER 31 DESEMBER 2016**

URAIAN	CATATAN	30-Jun-16		% thd	30-Jun-15
		ANGGARAN	REALISASI	Angg	REALISASI
<b>PENDAPATAN</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1				
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>					
<b>BELANJA</b>	<b>B.2.</b>				
<b>Belanja Operasi</b>					
Belanja Pegawai	B.3	4,383,671,000	2,306,525,364	52.62	4,238,822,129
Belanja Barang	B.4	11,788,721,000	9,042,753,140	76.71	5,666,957,010
Belanja Bantuan Sosial	B.5	-	-	0.00	-
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>		16,172,392,000	11,349,278,504	70.18	9,905,779,139
<b>Belanja Modal</b>					
Belanja Modal Tanah	B.6	-	-	0.00	-
Belanja Peralatan dan Mesin	B.7	153,700,000	103,300,000	67.21	90,851,150
Belanja Gedung dan Bangunan	B.8	-	-	0.00	304,235,000
Belanja Jalan, Irigasi, Jaringan	B.9	-	-	0.00	-
Belanja Modal Lainnya	B.10	-	-	0.00	-
<b>Jumlah Belanja Modal</b>		153,700,000	103,300,000	67.21	395,086,150
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>16,326,092,000</b>	<b>11,452,578,504</b>	<b>70.15</b>	<b>10,300,865,289</b>

**BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KLATEN**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**PER 31 DESEMBER 2017**

URAIAN	CATATAN	30-Dec-17		% thd Angg	30-Dec-16
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
<b>PENDAPATAN</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	785,868	0.00	2,092,615
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		-	<b>785,868</b>	<b>0.00</b>	<b>2,092,615</b>
<b>BELANJA</b>	<b>B.2.</b>				
<b>Belanja Operasi</b>					
Belanja Pegawai	B.3	4,717,489,000	4,442,869,870	94.18	2,306,525,364
Belanja Barang	B.4	2,627,464,000	2,315,455,567	88.13	9,042,753,140
Belanja Bantuan Sosial	B.5	-	-	0.00	-
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>		7,344,953,000	6,758,325,437	92.01	11,349,278,504
<b>Belanja Modal</b>					
Belanja Modal Tanah	B.6	-	-	0.00	-
Belanja Peralatan dan Mesin	B.7	96,250,000	95,209,000	98.92	103,300,000
Belanja Gedung dan Bangunan	B.8	-	-	0.00	-
Belanja Jalan, Irigasi, Jaringan	B.9	-	-	0.00	-
Belanja Modal Lainnya	B.10	-	-	0.00	-
<b>Jumlah Belanja Modal</b>		96,250,000	95,209,000	98.92	103,300,000
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>7,441,203,000</b>	<b>6,853,534,437</b>	<b>92.10</b>	<b>11,452,578,504</b>

**BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KLATEN**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**PER 31 DESEMBER 2018**

URAIAN	CATATAN	31-Dec-18		% thd Angg	31-Dec-17
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
<b>PENDAPATAN</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	6,701,663	0.00	785,868
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		-	<b>6,701,663</b>	<b>0.00</b>	<b>785,868</b>
<b>BELANJA</b>	<b>B.2.</b>				
<b>Belanja Operasi</b>					
Belanja Pegawai	B.3	5,633,766,000	5,331,853,737	94.64	4,442,869,870
Belanja Barang	B.4	1,918,248,000	1,740,681,729	90.74	2,315,455,567
Belanja Bantuan Sosial	B.5	-	-	0.00	-
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>		7,552,014,000	7,072,535,466	93.65	6,758,325,437
<b>Belanja Modal</b>					
Belanja Modal Tanah	B.6	-	-	0.00	-
Belanja Peralatan dan Mesin	B.7	70,456,000	69,434,350	98.55	-
Belanja Gedung dan Bangunan	B.8	-	-	0.00	95,209,000
Belanja Jalan, Irigasi, Jaringan	B.9	-	-	0.00	-
Belanja Modal Lainnya	B.10	-	-	0.00	-
<b>Jumlah Belanja Modal</b>		70,456,000	69,434,350	0.00	95,209,000
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>7,622,470,000</b>	<b>7,141,969,816</b>	<b>93.70</b>	<b>6,853,534,437</b>



**UMKLA** UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
KLATEN

Andal & Bermartabat

Jl. Ir. Soekarno, km 1, Buntalan, Klaten Tengah, 57419. Telp : 0272-323120  
Website : [www.umkla.ac.id](http://www.umkla.ac.id) Email : [admin@umkla.ac.id](mailto:admin@umkla.ac.id)

**SURAT TUGAS**

**Nomor : 95/I.3.AU/F.2/2022**

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Klaten menugaskan kepada dosen/peneliti yang namanya tertera di bawah ini untuk melaksanakan rangkaian kegiatan penelitian, dengan judul "Analisis Kinerja Keuangan Pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten", pada bulan Maret-April 2022, di Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten

Nama : Arie Rachma Putri, SE., M.Si.  
NIDN : 060620057703

Demikian surat tugas ini kami sampaikan untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dan memberi laporan setelah pelaksanaan selesai.

Klaten, 3 Maret 2022

Ketua LPPM,



Gnd Hardiyani, SKM., M.Kes